

**PENGARUH TINGKAT KESEHATAN, JUMLAH PENDUDUK DAN
TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI
KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM TAHUN 2009-2018**



Program Studi : Ekonomi islam

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**PENGARUH TINGKAT KESEHATAN, JUMLAH PENDUDUK DAN
TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI
KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM TAHUN 2009-2018**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**WIKA MAYASARI
NPM 1551010315**

Program Studi : Ekonomi islam

Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E.M.E

Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Kemiskinan menurut Mudrajad Kuncoro ialah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia. Garis kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 garis kemiskinan sebesar 198076.45 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 mencapai 351167.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di kabupaten Tanggamus, apakah tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di kabupaten Tanggamus dan Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dalam perspektif Ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam periode pengamatan tahun 2009-2018, yaitu data kesehatan (angka harapan hidup, jumlah penduduk, pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan kemiskinan (garis kemiskinan) di Kabupaten Tanggamus, data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar $0,01 < 0,05$, jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar $0,80 > 0,05$. Dan secara simultan tingkat kesehatan, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$. Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dikarenakan masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Tanggamus yang disebabkan oleh penduduk miskin tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam Islam tidak menganjurkan umatnya untuk hidup miskin, Islam melarang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah dan miskin. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan melarang membuang waktu dengan hal yang sia-sia.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kesehatan, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kesehatan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2018

Nama : Wika Mayasari
NPM : 1551010315
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003

Pembimbing II

M. Kurniawan, S.E., M.E. Sy
NIP. 198605172015031005

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kesehatan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2018”** disusun oleh: **WIKA MAYASARI, NPM. 1551010315**, Jurusan : **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Senin/16 Desember 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Ahmad Isnaeni, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dania Hellin, M.Sc (.....)
Penguji I : Any Eliza, M.A (.....)
Penguji II : Ahmad Habibi, S.E., M.E (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



**Dr. Ruslan, Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001**

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ۖ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

أَلْعِٰبِ ۖ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya: Dan Katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’

(Qs. At-Taubah:105)



PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang tulus kepada:

1. Kedua orang tua ku terkasih Bapak Margono dan Ibu Shaleha yang selalu senantiasa mendoakan, selalu menjadi penyemangat, dan selalu memberikan semua yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakak kandungku (Agus, Siti, dan Amir), kakak iparku (Ernida Wati, Mukidi dan Nur Hayati) yang selalu memberikan motivasi, waktu, dan materinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



RIWAYAT HIDUP

Wika Mayasari dilahirkan di Kacamarga, pada tanggal 28 Maret 1997, anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Margono dan Ibu Shaleha. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SD N 1 Kacamarga Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Lulus pada tahun 2009
2. MTs N 1 Pringsewu Kab. Pringsewu, Lulus pada tahun 2012
3. MAN 1 Pringsewu Kab. Pringsewu, Lulus pada tahun 2015
3. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya uamg senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH TINGKAT KESEHATAN, JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2018” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E.M.E selaku dosen pembimbing satu yang telah bersedia mel;uangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy selaku dosen pembimbing dua yang telah bersedia ,eluangkan waktunya untuk m,emberikan arahan selama menyusun skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus yang telah membantu memberikan izin penelitian dan informasi sehingga sangat membantu kelancaran penelitian ini.
6. Kedua Orang Tua beserta kakak-kakak ku yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi.

7. Terimakasih Rian Aji Setyawan, S.Pd. yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabat ku Laras Puri Tama, S.E., Mitha Angraeni, S.E., Novia Radika Yanti, S.E., Teguh Sunaryo, S.E., Meta Kartika Sari, S.Pd., Tiwi, Hilda, dkk yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Mmilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17

BAB II LANADASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kemiskinan	
1. Definisi Kemiskinan	19
2. Teori Kemiskinan	23
3. Penyebab Kemiskinan	26
4. Indicator Dalam Kemiskinan	28
5. Kemiskinan Menurut Pandang Ekonomi Islam	31
B. Kesehatan	

1. Definisi Kesehatan	45
2. Kesehatan Dalam Ekonomi Islam	47
3. Kesehatan Dalam Sudut Pandang Ekonomi	49
4. Hubungan Kesehatan Dengan Kemiskinan	51
C. Jumlah Penduduk	
1. Definisi Penduduk	53
2. Teori Kependudukan	55
3. Factor Demografi	61
4. Ledakan Penduduk	65
5. Penduduk Menurut Perspektif Ekonomi Islam	69
6. Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Kemiskinan	71
D. Pendidikan	
1. Definisi Pendidikan	73
2. Indicator Pendidikan	77
3. Jenis-Jenis Pendidikan	79
4. Tujuan Pendidikan	80
5. Pendidikan Menurut Islam	83
6. Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan	87
E. Tinjauan Pustaka	89
F. Kerangka Pemikiran	92
G. Hipotesis	93

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	
1. Jenis Penelitian	98
2. Sifat Penelitian	99
B. Sumber Data	99
C. Teknik Pengumpulan Data	100
1. Dokumentasi	100
2. Studi Pustaka	100
D. Populasi Dan Sample	
1. Populasi	101
2. Sample	101
E. Definisi Operasional	
1. Variabel Terikat	102
2. Variable Bebas	102
F. Teknik Analisis Data	103

BAB IV

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus	109
2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Tanggamus	110
3. Keadaan Demografi Kabupaten Tanggamus	111
4. Sejarah Singkat Kabupaten Tanggamus	112
5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus	113
B. Hasil Penelitian	
1. Kemiskinan	115
2. Kesehatan	115
3. Jumlah Penduduk	116
4. Pendidikan	117
C. Hasil Analisis Data	
1. Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas	122
b. Uji Multikolinearitas	123
c. Uji Autokorelasi	124
d. Uji Heteroskedastisitas	125
2. Uji Hipotesis	
a. Analisis Regresi Linier Berganda	126
b. Uji t	28
c. Uji F	129
d. Koefisien Determinasi	130
D. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Pembahasan Secara Parsial Tentang Pengaruh Kesehatan, Jumlah Penduduk dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan	130
2. Pembahasan Secara Simultan Tentang Pengaruh Kesehatan, Jumlah Penduduk dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan	138
3. Pembahasan Secara Parsial Tentang Pengaruh Kesehatan, Jumlah Penduduk dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	140

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	148
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul Pengaruh Tingkat Kesehatan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Tanggamus Dalam Perspektif Ekonomi Islam (tahun 2008-2017). Guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam penafsiran dari judul skripsi ini, maka penulis perlu memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dimaksud dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.¹

2. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.²

3. Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.³

¹ Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka 2002), h. 65

² Siti Nafsiah, prof Hembing pemenang the Star of Asia Award : pertama di Asia ketiga di dunia” Gema Insani, 2009

³ Saharuddin Didu dan Feri Fauzi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.6, No.1, April 2016, h. 106

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia dalam upaya membentuk manusia yang berkualitas sehingga mampu memajukan dan mengembangkan suatu negara.⁴
 5. Kemiskinan adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis maupun dimensi spiritual.⁵
 6. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar bagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi).⁶
 7. Ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Para ulama, khususnya para ahlusunah wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-quran, sunah, ijma' dan qiyas.⁷
- Menurut beberapa ahli ekonomi islam bahwa pengertian ekonomi islam:
- “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam”⁸

⁴ Badan Pusat Statistik Lampung, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2011-2015, (Lampung: Badan Pusat Statistik Lampung, 2015) h.9

⁵ Irfan Syauqi. Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.68

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008), h.58

⁷ Lukman HAKIM, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.16

⁸ Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h.17

Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam”⁹

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana pengaruh tingkat kesehatan, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan dalam perspektif islam di Kabupaten Tanggamus.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Berhasilnya pembangunan di suatu daerah mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Berhasilnya suatu pembangunan daerah dapat tercermin dalam laju pertumbuhan penduduk miskin. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanggamus yang menempati posisi ke 6 dalam urutan daerah miskin di provinsi lampung menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Tanggamus nampak belum berhasil.

Kemiskinan mengakibatkan terjadi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat karena kesehatan dan pendidikan yang tinggi rata-rata hanya dapat diakses oleh masyarakat yang mampu saja. Dengan kenyataan ini maka kecil harapan bagi masyarakat miskin

⁹ Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Perkasa Yas, 1997), h.19

dapat mengakses pelayanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang tinggi.

2. Secara Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang pengaruh kesehatan, jumlah penduduk dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Tanggamus di tinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Di samping itu pula data yang penulis lakukan ini dapat di peroleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait dan juga penelitian yang dilakukan penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Negara-negara berkembang didunia termasuk Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan yaitu kemiskinan, menurut para ahli ekonomi kemiskinan Indonesia bersifat multidefensial. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan suatu yang nyata dan ada di kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiribagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. Walaupun

demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang sedang mereka jalani. Kesadaran kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial yang tinggi.¹⁰

Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dampak dari pertumbuhan penduduk di Indonesia salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan menurut Mudrajad Kuncoro ialah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia.¹¹ Kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.¹²

Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi problem dan sudah ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau

¹⁰ Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2010

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Masyarakat Dan Budaya*, Volume 5 no. 1 tahun 2003, hal.63

¹² Ain Mahaeni, et. Al. "Evaluasi Program – Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali", *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. X No. 1 : 8

materi.¹³ Apabila dilihat dari pola hubungan sebab akibat orang miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit didalam lingkaran ketidakberdayaan berada di bawah standar aktifitasnya tetapi menjalani kegiatan seperti layaknya orang-orang yang berkehidupan yang lebih baik, dan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak ada akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.¹⁴

Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pembangunan nasional. Kondisi suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan menjadi masalah yang masih menjadi perhatian.¹⁵

¹³ Nano Prawoto, *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2009:58

¹⁴ Katalog BPS, Kabupaten Pesawaran:2011 h. 97

¹⁵ Noor Zuhdiyati, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir (studi kasus pada 33 provinsi)" JIBEKA, Vol.11 No.2 tahun 2017, hal, 27

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Indonesia Tahun 2013-2018

Tahun	Garis Kemiskinan
2018	817.924
2017	771.905
2016	722.534
2015	689.412
2014	623.534
2013	551.558

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tabel 1.1 bisa dilihat bahwa garis kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan secara fluktuatif dimana pada tahun 2013 garis kemiskinan sebesar 551.558 kemudian meningkatn pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 817.924.

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan mengacu kepada garis kemiskinan. Standar garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum dan merupakan batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Melalui pendekatan sosial masih sulit untuk menentukan garis kemiskinan masyarakat, tetapi dalam istilah ekonomi, secara teori dapat di hitung dengan tiga jenis pendekatan yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Saat ini, Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menentukan garis kemiskinan lainnya di Indonesia dikembangkan oleh Sajogyo pada tahun 1975, yang menyatakan bahwa orang miskin memiliki pengeluaran setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun atau sekitar Rp

133.333,2 per kapita perbulan. Garis kemiskinan yang diterapkan oleh BPS maupun Sajogyo di duga terlalu renda untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum bahkan lebih rendah dari garis kemiskinan Bank Dunia US\$ 1 per kapita per hari.

Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah : (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, (4) adanya perbedaan kesempatan antara anggota masyarakat dan sistem yang mendukung, (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi, (6) rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, (7) budaya idup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good govermance*), (9) pengelolaan sumber daya.¹⁶

Tabel 1.2
Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Menrut Kabupaten/Provinsi Lampung
Tahun 2009-2018

Wilayah	Garis Kemiskinan Kapita Perbulan (Rp/Kap/Bulan) (Rupiah)									
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Lampun g Barat	3914 44	3825 76	3719 26	3355 00	3207 23.8 1	3101 26	29110 6.03	2696 70	23766 0	21156 8.42
Tangga mus	3511 67	3414 43	3323 02	3095 69	2990 51.3 5	2875 60	26714 8.45	2501 34	22250 4	19807 6.45
Lampun g Selatan	3758 68	3605 94	3464 57	3194 48	3075 45.6 0	2956 01	27440 1.17	2561 53	22711 3	20217 8.57

¹⁶ Ali Khomsan dkk, 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia h.6-17

Lampung Timur	352173	342295	331765	307944	301338.98	291405	273573.77	257284	227698	202699.99
Lampung Tengah	385132	373980	362475	336449	326613.28	313940	291445.31	271262	239228	212964.25
Lampung Utara	390927	379962	369628	346393	338031.96	322835	296178.11	274291	241789	215244.48
Way Kanan	333033	323691	313733	291207	286517.60	276091	257498.18	241330	208744	185827.17
Tulang Bawang	384465	373681	362185	337167	307348.96	295738	275088.30	256793	223181	198678.50
Pesawaran	360909	347215	330874	305540	294602.57	284897	267475.04	251723	226631	201749.56
Pringsewu	408174	398830	379279	350883	329405.20	315779	291711.78	269212	237868	-
Mesuji	370497	360105	353477	328859	308294.53	296102	274491.63	256185	228027	-
Tulang Bawang Barat	384933	370332	358939	329796	303252.39	291721	271222.57	253773	226563	-
Pesisir Barat	393302	390885	371724	342310	-	-	-	-	-	-
Bandar Lampung	562277	540679	502968	476055	450013.64	429146	392641.60	359948	318458	283495.67
Metro	360656	346491	331201	314891	305747.92	293994	273116.75	255231	221565	197240.39
Provinsi Lampung	402307	384882	364922	337996	318821.97	295395.36	263087.58	234073.46	202414.14	188812

Sumber: Badan Pusat Statisti Provinsi Lampung

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa garis kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan secara fluktuatif selama 10 tahun dimana pada tahun 2009 garis kemiskinan sebesar Rp. 188.812 kemudian

mengalami peningkatan pada tahun 20018 garis kemiskinan mencapai angka sebesar Rp 402.307.

Di Pulau Sumatera, Lampung masuk peringkat ke tiga dari bawah soal pengentasan kemiskinan. Apalagi di tingkat nasional, Lampung masih sangat tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lain. Sekitar 70% penduduk di Lampung tinggal di pedesaan dan angka kemiskinannya justru ada di perkotaan. Begitu juga tingkat pengangguran terbuka diperkotaan jauh lebih tinggi daripada pedesaan.¹⁷

Tidak jauh dengan kondisi kemiskinan di Lampung, Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Pada tabel 1.2 dapat dilihat garis kemiskinan di Kabupaten tanggamus setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 garis kemiskinan sebesar Rp 198.076,85 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp 351.167. Kenaikan garis kemiskinan banyak di picu oleh faktor diantaranya kesehatan, jumlah penduduk dan pendidikan.

¹⁷Pengentasan Kemiskinan di Lampung Masih Rendah, tersedia di : Media Indonesia.com (online) di akses pada tanggal 01-agustus-2019 pukul 15:07

Tabel 1.3
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2009-2018

Tahun	Angka Harapan Hidup
2009	68.92
2010	66.46
2011	66.58
2012	66.69
2013	66.79
2014	67.12
2015	67.42
2016	67.61
2017	67.80
2018	68.04

Sumber: Badan Pusat Statistik Tanggamus

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Tanggamus tahun 2009 yaitu 68,92 pada tahun berikutnya mengalami penurunan namun, pemerintah Kabupaten Tanggamus terus berupaya meningkatkan angka harapan hidup di masyarakat dimana pada tahun 2017 yaitu 67,80 dan meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 68,04 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan pada indikator kesehatan di Kabupaten Tanggamus.

Kesehatan juga mempengaruhi kemiskinan karena apabila masyarakat memiliki tingkat kesehatan atau harapan hidup yang tinggi akan berdampak pada masyarakat yang produktivitas dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga masyarakat bersemangat untuk memiliki pekerjaan dan akan mengakibatkan distribusi pendapatan masyarakat meningkat. Menurut Lincoln, intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan

meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan meningkatkan output energi.¹⁸

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanggamus Tahun 2009-2018

Tahun	Jumlah Penduduk
2009	486.284
2010	538.418
2011	545.909
2012	553.165
2013	650.625
2014	567.172
2015	573.904
2016	580.383
2017	586.624
2018	592.603

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanggamus

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk tahun 2009 sebesar 486.284 menjadi 592.603 pada tahun 2018.

Jumlah penduduk yang tinggi juga mempengaruhi distribusi pendapatan karena semakin banyaknya pertumbuhan penduduk maka akan semakin sempit lapangan pekerjaan yang tersedia, jumlah penduduk yang banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunna ekonomi di negara berkembang. Pendapatan perkapita rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin

¹⁸ Anggit Yoga Permana, Skripsi:”Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran,Pendidikan,dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”(Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), H.36

sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk.¹⁹

Tabel 1.5
Rata-rata Lama Sekolah Di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018

Tahun	Rata-rata lama sekolah
2009	7.26
2010	7.36
2011	7.40
2012	7.43
2013	7.43
2014	6.63
2015	7.27
2016	6.87
2017	6.87
2018	6.96

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanggamus

Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanggamus terus mengalami penurunan pada tahun 2009-2018, dimana rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 sebesar 7.26 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 6.96 .

Pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan pekerjaan. Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia, yang mana investasi tersebut dinamakan dengan Human Capital (teori modal manusia). Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai stock manusia, dimana nilai stock manusia setelah mengikuti pendidikan

¹⁹ Evi Andriani, Sri Indah Handayani, “Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.8, No. 2 (Juli 2008), h.2

dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (social benefit) individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan.²⁰

Sedangkan kemiskinan menurut pandangan islam , membagi kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-‘ailat (mengalami kekuarangan), al-ba’sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu’tarr (yang perlu dibantu) dan al-dha’if (lemah). Kesepuluh kosakata tersebut menyandarkan pada satu arti atau makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Hukum kaya dan miskin sesungguhnya adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia, apa pun keyakinannya,. Karena itu tak ubahnya seperti kondisi sakit, sehat, marah, sabar, sama halnya dengan masalah spirit, semangat hidup, disiplin, etos kerja, rendah dan mentalitas. Dalam konsep ekonomi islam sendiri kajian tentang kemiskinan mendapat perhatian yang cukup besar, menurut bahasa miskin berasal dari bahasa Arab sebenarnya yang menyatakan kefakiran yang sangat.

²⁰ Anggun Kembar Sari, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang , h.4

Kemiskinan menurut islam disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena keterbatasan untuk bekerja, penindasaan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Namun, faktor-faktor tersebut sudah mulai di benahi, walaupun ada yang secara sungguh-sungguh maupun serengah-setengah.

Ibn Qayyim berpendapat yaitu “daripada kalangan orang kaya dan orang miskin, yang paling disukai adalah makhluk yang bertaqwa pada Allah dan dia melebihkan amanah-amanah baik. Oleh karena itu, orang kaya dan orang miskin adalah sama dalam asas ukuran ini. “Dia juga berpendapat bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ciptaan Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya siapa yang lebih baik dalam amalan-amalannya. Kadang kala Allah menguji seseorang dengan memberikan kepadanya kekayaan yang melimpah ruah. Pada masa yang lain seseorang itu di uji dengan kemiskinan.”²¹

Kemiskinan itu tidaklah terletak pada sedikitnya harta, tetapi terletak pada kering kerontangnya hati. Islam melarang umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam QS, An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

²¹ Prof. Dr. Joni Tamkin Bin Borhan, *Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*, Jurnal Usuluddin, Bil 25 (2007),H.97

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

٩

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Qs.An-Nisa:9)*

Maksud dari ayat di atas ialah bahwa kemiskinan itu tidaklah terletak pada sedikitnya harta, tetapi terletak padakering kerontangnya hati. Islam melarang umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin, maka dari itu orang tuanya harus mempersiapkan anak keturunannya dengan baik, dengan cara bertaqwa kepada Allah SWT.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di kabupaten Tanggamus?
2. Apakah tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di kabupaten Tanggamus?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial tingkat kesehatan, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018.
 - c. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang telah di uraikan diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan disuatu wilayah dan solusinya. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam melakukan program penanggulangan kemiskinna.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tanggamus dan menjadi tolak ukur dan gambaran upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupten Tanggmus.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi disetiap perguruan tinggi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Bank Dunia menjelaskan kemiskinan telah menunjukkan bahwa ada tiga dimensi (aspek atau segi) yaitu: pertama, kemiskinan itu multidimensional. Artinya karena kemiskinan itu bermacam-macam sehingga memiliki banyak aspek. Kedua, aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Sedangkan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.²²

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk

²² Hadi Payitno, Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1996), h. 98

memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²³

Menurut Kurniawan, kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Sedangkan menurut European Union bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumber daya (material, sosial, dan budaya) yang sangat terbatas.²⁴

Kemiskinan menurut Shirazi dan Pramanik adalah situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman. Baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologi, maupun dimensi spiritual. Dalam proses pembangunan suatu negara ada tiga macam kemiskinan antara lain:

- a. Miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya.
- b. Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi ditengah-tengah kelimpahan, kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan sistem yang berlaku.

²³ Elly M. Setiadi. Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 788

²⁴ Ali Khomsan, dkk, 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), h. 6-7

c. Kemiskinan yang terjadi karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk nasional total.²⁵

Kemiskinan memiliki makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam ukuran kemiskinan yang paling umum di gunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas dasar kebutuhan biasanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatn tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat diartikan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan konsep kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

²⁵ Cica Zartika, “*Studi Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*” (Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016), h .7

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selaluberarti orang tersebut miskin. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatn seseorang usdah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang yang ada di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini tyerjdi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan disekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep kemiskinan ini yang keemudian disebut dengan konsep kemiskinan relatif.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat ynag umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang reatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapar berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan beragantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang

pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik.

2. Teori Kemiskinan

a. Teori lingkaran perangkap kemiskinan oleh Nurkse

Menurut Nurkse seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang, menurut teorinya kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Nurkse mengemukakan teorinya tersebut sebagai suatu landasan untuk menjelaskan tentang perlunya di laksanakan strategi pembangunan seimbang di negara berkembang.

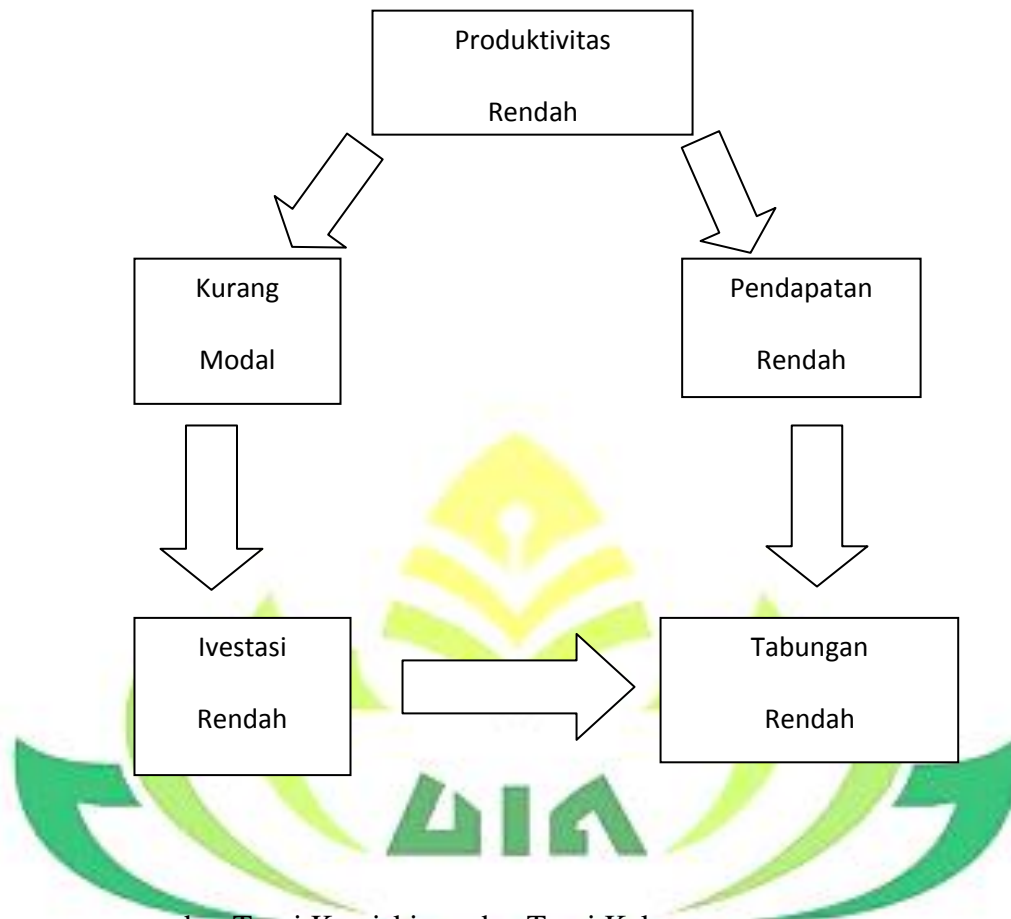
Dalam teori ini Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang. Menurut pendapatnya lingkaran perangkap kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di

negara berkembang kedua faktor tersebut tidak memungkinkan di laksanakan tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.

Dari segi penawaran modal lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan secara berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berbeda. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran).²⁶

²⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 113-114.

Gambar 2.1
Lingkaran Perangkap Kemiskinan Menurut Nurkse



b. Teori Kemiskinan dan Teori Kelas

Teori ini dikategorikan menjadi dua, yaitu teori yang memfokuskan pada teori perilaku individu dan teori yang mengarah pada struktur sosial. Teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif, mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Teori struktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu yaitu mengakibatkan munculnya sikap individu

yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan kemiskinan.

Pada tingkat ekstrem, kedua model ini bersifat sangat normatif terlihat dari tulisan-tulisannya tentang teori perilaku individu sama-sama melakukan tuduhan moral, bahwa orang yang tidak produktif dikarenakan mereka lemah dibidang kualitas, latihan dan moralitas, dan mereka harus bangkit sendiri dan berbuat lebih baik. Juga melalui tulisan-tulisan yang disampaikan oleh teori struktur sosial mengenai penilaian moral bahwa struktur sosial yang ada saat ini tidak adil terhadap kelompok miskin sehingga harus diubah.

Berdasarkan dari kedua teori tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap individu atau masyarakat harus memiliki sikap yang produktif agar dapat bersaing dengan kalangan masyarakat lainnya, jika setiap individu menyadari betapa pentingnya sifat produktif maka dapat diyakini akan sedikit mengurangi beban ekonomi mereka karena bila kita memiliki sikap produktif yang tinggi maka akan mengakibatkan penghasilan kita meningkat, yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp dalam Kuncoro terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika di pandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan

muncul karena ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Menurut Todaro kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara enam karakteristik berikut:

- 1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan perkapita dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- 3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangannya gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat

kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.

- 6) Fasilitas di kebanyakan negara berkembang maupun kurikulumnya relatif masih kurang relevan ataupun kurang memadai.²⁷

Selain itu, timbulnya kemiskinan pada negara berkembang juga dikarenakan oleh kemampuan sumber daya manusianya yang masih rendah sehingga mengakibatkan sulitnya mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kondisi ini semakin diperburuk oleh banyaknya tenaga kerja yang di-PHK, karena para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri mengalami kebangkrutan atau lebih suka melairkan modalnya ke luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk memikirkan berbagai tindakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan.²⁸

4. Indikator-indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPENAS (badan pengawas nasional) memiliki makna yang relatif luas yaitu, dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, yaitu sebagai berikut :

- 1.) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan.

²⁷ Andri Maulita Suryndari, Skripsi: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014” (Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), h. 18-19.

²⁸ Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah, “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.4, No.2 (Desember 2007), h. 212

- 2.) Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan.
- 3.) Terbatasnya akses dan mutu layanan pendidikan.
- 4.) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.
- 5.) Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah.
- 6.) Terbatasnya akses perumahan dan sanitasi.
- 7.) Terbatasnya akses terhadap air bersih.
- 8.) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.
- 9.) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat.
- 10.) Lemahnya jaminan rasa aman.
- 11.) Lemahnya partisipasi.
- 12.) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggung jawab keluarga.
- 13.) Tata kelola pemerintahannya yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.²⁹

Sedangkan, menurut BPS masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu presentase penduduk miskin, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Indikator-indikator

²⁹ Nano Prawoto, "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya", jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 9 No.1 (April 2009), h. 59-60

utama kemiskinan dari pendeketan ini yang di kutip oleh BPS, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun kelompok.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi terhadap kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, jandan miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Selain BPS, UNDP dalam laporan *Human Development Report* 1997 memperkenalkan ukuran kemiskinan dimana ukuran kemiskinan disebut dengan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*). Kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivation*), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan.³⁰

5. Kemiskinan Menurut Pandangan Ekonomi Islam

a. Pengertian Kemiskinan

Kata miskin asal katanya adalah *as-sakan* , artinya lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata, “Huruf *sin*, *kaf* dan *nun* adalah huruf-huruf yang asli dan umum, menandakan dari satu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergolak. Seperti dikatakan, ‘*sakana asy-syai’ u yas kunu sukûnan sâkinan*’.

³⁰ Christina Usmaliadanti, *Analisis Pengaruh Tingka Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Keseatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Diponegoro, Semarang, 2011), h. 55-56

Jadi, orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran, dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, bisa karena ia menaruh kepercayaan kepada orang lain, atau karena kefakiran telah benar-benar membuat gerakannya menjadi sedikit atau mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga dengan orang yang berdiam di rumahnya saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia.

Kemiskinan menurut Shiraji adalah suatu keadaan yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologi, maupun dimensi spiritual.

Sedangkan menurut Al-Ghazali kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang ia butuhkan secara mendasar. Ketidakmampuan selain kebutuhan dasar bukan termasuk kemiskinan.³¹

Al-Quran telah menjelaskan mengenai orang miskin melalui firman Allah dalam suat Al-Balad ayat 12-17:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ۚ ١٣ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ ١٤

³¹ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta.2015), h.

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ ١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ ١٧

Artinya : “Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?,(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahay), atau memberi makan kepada pada hari terjadi kelaparan,(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir, kemudia dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang”

Maksud ayat di atas ialah, bahwa kita diwajibkan untuk menolong orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, dan saling tolong menolong dalam segala situasi baik itu situasi baik maupun dalam keadaan situasi yang kurang baik, atau menurut bahasa seperti ucapan Ibn Katsir, “Orang miskin itu ialah orang yang terlantar dan terbuang di jalan”.

Dalam hal ini, Ibnu Abas berkata, “*Dzâ matrabah* artinya terlantar di jalan, tidak memiliki rumah dan tidak memiliki sesuatu yang melindunginya dari debu”.³²

Ibn Qayyim berpendapat yaitu “daripada kalangan orang kaya dan orang miskin, yang paling disukai adalah makhluk yang bertaqwa pada Allah dan dia melebihkan amanah-amanah baik. Oleh karena itu, orang kaya dan orang miskin adalah sama dalam asas ukuran ini. “Dia juga berpendapat bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ciptaan Allah SWT untuk menguji hamba-hambaNya siapa yang lebih baik dalam amalan-amalannya. Kadang kala Allah menguji seseorang dengan memberikan

³² Mahmud Ahmad Sa'id Al-Athasy, *Hikmah di Balik Kemiskinan* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 10-15.

kepadanya kekayaan yang melimpah ruah. Pada masa yang lain seseorang itu di uji dengan kemiskinan.³³

Kemiskinan itu tidaklah terletak pada sedikitnya harta, tetapi terletak pada kering kerontangnya hati. Islam melarang umatny aunkt meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam QS, An-Nisa sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Qs.An-Nisa:9)

Maksud dari ayat di atas adalah kita sebagai manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT dilarang meninggalkan anak-anak dalam keadaan apapun, terlebih dalam keadaan susah atau kekurangan. Karena dengan kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan sedang susah atau sulit dalam perekonomian, di khawatirkan akan berdampak buruk pada mental anak tersebut, yang mana nantinya pada saat ia dewasa akan menjadikan ia sebagai individu yang tidak memiliki masa depan dan tidak dapat atau tidak mau mengenyam pendidikan yang pada akhirnya akan membuat anak tersebut tidak bisa terlepas dari kondisi kemiskinan itu sendiri.

Secara etimologis, lafadz miskin merupakan isim masdar yang berasal dari sakana-yaskunu-sukun/miskin. Di lihat dari asalnya, sakana-sukun,

³³ Prof. Dr. Joni Tamkin Bin Borhan, *Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*, Jurnal Usuluddin, Bil 25 (2007), h.97

kata ini memiliki makna ‘diam’, ‘tetap’ atau ‘reda’. Al-Asfihani dan Ibn Manshur mengartikan kata ini sebagai ‘tetapnya sesuatu setelah ia bergerak’. Selain arti tersebut, kata sakan-sukun juga bisa diartikan sebagai ‘tempat tinggal’.

Jika di lihat dari makna aslinya yang berarti ‘diam’, maka kata miskin dapat ditarik arti secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut tidak dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak.³⁴

Kata miskin juga dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, atau orang yang diam oleh kefakiran serta dapat pula di artikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, kata miskin juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan ada juga yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵

b. Jenis Kemiskinan Menurut Islam

Al-Quran mengemukakan tiga jenis kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1) Kemiskinan Materi

³⁴ Bn Mansur, *Lisan al-arab, Juz III* (Beirut: Dar Ilmiyah, 2009), hlm.260

³⁵ M. Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi. *al-Quran: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kaukaba,2012),hlm.159

Kemiskinan materi adalah keadaan manusia yang berada pada taraf membutuhkan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga perlu dibantu oleh orang lain. Menurut Fuad ‘Abd al Baqiy, kebutuhan dasar yang bagi penyandang kemiskinan yang banyak disebut di dalam Al-Quran adalah kebutuhan pangan. Ini dapat dilihat dari pemakaian kosa kata ini, maka sembilan diantaranya disebutkan dalam konteks perintah memerikan makan kepada orang miskin. Kebutuhan manusia akan pangan merupakan salah satu kebutuhan jasmani yang bersifat pokok. Artinya, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kebutuhan pangan harus dipenuhi. Jika diabaikan, manusia akan mengalami kesusahan, dan bahkan mungkin mengalami kematian. Contoh kemiskinan materi ialah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri, sehingga ia perlu mendapat bantuan dari orang lain.

2) Kemiskinan Jiwa

Kemiskinan jiwa (rohani) adalah sifat jiwa yang buruk dan tercermin dalam bentuk sikap negatif, seperti rendah diri atau kehinaan, kehilangan gairah atau pesimis, dan perasaan tidak puas dengan apa yang diperolehnya. Jenis kemiskinan

ini erat kaitannya dengan apa yang dinamakan kemiskinan moral.

Kemiskinan jiwa mencakup pula apa yang di istilahkan dengan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif lebih kepada mengacu kepada pertimbangan psikologis masyarakat, yakni ketidaksamaan perolehan yang didapat oleh masing-masing individu. Seseorang yang mendapat lebih sedikit akan merasa miskin apabila membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki lebih banyak. Kemiskinan relatif akan senantiasa ada, termasuk di negara-negara yang sudah maju. Kemiskinan jiwa terjadi akibat rendahnya kesadaran akan nilai, norma dan aturan yang berlaku di masyarakat yang nantinya akan menimbulkan kasus praktek prostitusi yang banyak terjadi di kota-kota besar.

3) Kemiskinan dalam arti khusus

Kemiskinan dalam arti khusus adalah kemiskinan manusia terhadap penciptanya. Pandangan ini terkait dengan dimensi spiritual yang ada pada diri manusia. Akan tetapi, tidak semua orang menyadari atau menunjukkan kepedulian terhadap hal ini. Kemiskinan ini terjadi kurangnya tingkat keimanan seseorang terhadap penciptanya, ia berpendapat bahwa sudah ada yang mengatur segala sesuatu di dunia ini,

sehingga ia tidak berusaha dan berdoa melainkan ia hanya pasrah dengan keadaan saat ini.³⁶

c. Pengentasan Kemiskinan Menurut Hukum Islam

1. Perintah Mengentaskan Kemiskinan

Salah satu hal yang ditekankan al-Quran dalam membicarakan tentang kemiskinan ialah perlunya membantu mereka yang mengalami kemiskinan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Penekanan ini tampaknya bertujuan : (1) untuk menjaga kelangsungan hidup orang miskin dan membantu mereka untuk menanggulangi kesulitan hidup yang dialami, (2) untuk menghindarkan mereka dari perbuatan tercela karena pengaruh kemiskinan. Kedua hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang dimaksudkan untuk kemashalatan manusia lahir dan batin, materil dan spiritual, dunia dan akhirat.

Kewajiban untuk membantu orang miskin tersebut seperti ditegaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣

وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ٤٥

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ٤٦ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ٤٧

³⁶ Joni Yusuf, *Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Sarjana Hukum Islam: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008), h. 35-36

Artinya : Apa yang memasukan kamu ke dalam saqar (neraka)? Mereka menjawab: “kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian (QS Al-Mudatsir: 42-47).

Ayat di atas menjelaskan bagaimana sebab-sebab manusia di campakan ke dalam neraka pada hari pembalasan. Salah satu dari sebab itu karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang yang hidupnya melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakkan. Perintah ini mempunyai kedudukan yang penting seperti halnya perintah agama kepada manusia agar menegaknya shalat atau menyembah Tuhan.

2. Filosofi Kewajiban Membantu Orang Miskin

Menurut Quraish Shihab, perintah ”memberi makan” kepada orang miskin hendaknya dipahami bukan sekedar pemberian pangan, tetapi mencakup segala macam bantuan, demikian pula kata ”miskin” tidak hanya terbatas pengertiannya pada ”orang yang tidak memiliki biaya hidup cukup”. Sehingga pemberian bantuan kepada orang miskin ini paling tidak ada tiga faktor yang melandasi filosofi dari kewajiban tersebut, yaitu:

- a) *Istikhaf* (sebagai khalifah di bumi)

Menurut Al-Qur'an, Allah SWT adalah pemilik dan penguasa seluruh alam, termasuk harta benda. Manusia yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakikatnya hanya menerima dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Ia berkewajiban mengeluarkan zakat, sedekah dan infak bila hal itu dibutuhkan. Allah SWT menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan mereka bersama.

b) Solidaritas Sosial

Landasan kedua ini bermula dari pandangan Al-Qur'an dan kenyataan yang disadari oleh semua pihak bahwa "manusia adalah makhluk sosial". Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Keberhasilan manusia dalam berbagai bidang adalah berkat bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Allah sebagai pemilik segala yang ada di muka bumi ini, memerintahkan kita sebagai manusia agar senantiasa mengeluarkan harta benda yang pada hakekatnya milik orang yang membutuhkan.

c) Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa, sehingga antara seorang dengan yang lainnya terjalin hubungan persaudaraan dan pertalian darah. Persaudaraan

akan lebih kokoh bila diikat dengan persamaan akidah dan kesatuan tempat bermukim. Hubungan- hubungan tersebut menuntut hubungan ”memberi dan menerima”, dan juga kesediaan memberi tanpa mengharapkan imbalan.

Dari penjelasan tiga filosofi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu, Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya termasuk Allah menciptakan makhluk paling sempurna di muka bumi yaitu manusia, Allah menciptakan manusia agar selalu tolong menolong dalam hal hal kebaikan misalnya, tolong menolong dengan sesama manusia yang membutuhkan, karena pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri ia membutuhkan bantuan masyarakat lainnya, jika ia hidup selalu mengedepankan tolong menolong maka ia akan hidup damai jika ia dilanda kesusahan maka masyarakatlah yang akan menolong ia.

3. Alasan Orang Miskin Perlu di Bantu

Al-Qur'an mengidentifikasikan orang miskin sebagai golongan manusia yang lemah di dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Al-Qur'an menempatkan orang-orang miskin sebagai golongan sosial yang perlu dibantu, diperlakukan dengan baik, dan diberikan perlindungan.

a. Orang miskin perlu dibantu

Dalam firman Alla Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (QS. Al-Baqarah: 215).

Maksud ayat di atas ialah bahwa ada beberapa orang yang kepada mereka dianjurkan untuk diberikan infak (nafkah), yaitu orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Penyebutan orang miskin sesudah orang tua, kerabat dan anak yatim mengandung arti penting terhadap kedudukan orang miskin sebagai mereka yang tergolong keluarga mampu, mempunyai orang tua dan kerabat yang mampu, dengan sendirinya harus memberikan prioritas bantuan terhadap anak-anak yatim dan orang miskin.

Perbuatan memberikan nafkah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir tersebut merupakan perbuatan kebajikan. Kebajikan (*khoir*) dalam konsteks ayat di atas, menurut Sayyid Quthub, mengandung dua pengertian, yaitu: (a) yang diinfakkan itu adalah kebajikan, mengandung kebaikan bagi pemberi, penerima dan warga masyarakat, kebajikan itu sendiri adalah amal yang baik, pemberian yang baik, dan sesuatu yang baik; (b) hendaklah orang yang memberikan infak itu memilih yang terbaik dari

apa yang ia miliki dan berbagi rasa dalam kebaikan dengan orang lain.

b. Orang miskin harus diperlakukan dengan baik

Allah berfirman :

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۚ ١٠

Artinya : *Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. (QS. Ad-Dhuha: 10).*

Ayat ini mengandung larangan untuk mencela peminta-minta karena kekurangan (dalam ekonomi) mereka. Hendaknya kita sebagai seorang yang muslim yang baik memberi mereka makan (bantuan) atau jika kita enggan memberinya, maka kita mmenolaknya dengan lemah lembut dan jangan sekali-kali kita mengusirnya dengan kasar. Sedekah yang diikuti dengan cacian tidak diperlukan. Ucapan yang baik dan lemah lembut lebih baik dari itu. Ucapan yang baik membalut luka hati dan mengisinya dengan perasaan rida dan muka manis. Maaf itu menghapus kedengkian jiwa dan menggantinya dengan persaudaraan. Di samping itu, tutur kata yang baik bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta merupakan suatu bentuk pertolongan kepada orang yang meminta dan merupakan amal saleh yang sejalan dengan tujuan sedekah. Boleh jadi pada tutur kata yang baik itu terdapat bantuan yang bersifat immaterial bagi orang yang meminta.

c. Orang miskin perlu mendapat perlindungan

Allah berfirman :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.* (QS. An- Nisa': 135)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang kaya dan orang miskin sama kedudukannya di mata hukum. Yusuf 'Ali, mengemukakan bahwa sebagian orang mungkin cenderung berpihak kepada orang kaya sebab mereka mengharapkan sesuatu dari orang kaya, sebagian orang mungkin cenderung berpihak kepada orang miskin sebab mereka itu umumnya diabaikan. Keberpihakan terhadap salah satu di antara keduanya adalah salah. Keadilan harus ditegakkan tanpa rasa takut dan rasa senang. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama mendapat perlindungan dari Allah, yakni kepentingan mereka yang sah diperhatikan. Oleh karena itu, keduanya harus diperlakukan secara adil. Hal ini memberikan jaminan

perlindungan hukum bagi orang miskin sebagai orang yang lemah di dalam masyarakat yang sering kali tidak berdaya dalam menghadapi kezaliman pihak-pihak yang lebih kuat kedudukannya. Menurut Manan dalam perekonomian Islam yang terpenting keinginan untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu tiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tercapainya tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat Islami. Dinilai dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk golongan miskin tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif dalam Islam.³⁷

B. Kesehatan

1. Definisi Kesehatan

Kesehatan menurut Undang-undang No 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis.³⁸

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan tanggungjawab yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Kesehatan merupakan standar hidup minimum yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Kesehatan masyarakat yang cenderung baik akan berdampak pada produktivitas dan etos kerja yang meningkat pula, alhasil pendapatan yang dihasilkan meningkat seiring dengan perbaikan kesehatan di

³⁷ Ibid, h. 39-46

³⁸ Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , pasal 1

bertambah. Pendapatan yang meningkat akan mengangkat derajat seseorang untuk keluar dari kemiskinan.³⁹

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. pemerintah harus menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for health) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.⁴⁰

Kesehatan harus dianggap sebagai investasi yang sangat penting, karena jika kita memiliki fisik dan jiwa yang sehat maka kita akan lebih bersemangat untuk menciptakan sifat atau sikap yang produktifnya tinggi, sehingga kita mampu untuk bersaing dengan masyarakat lainnya dan kita tidak akan mengalami ketertinggalan. Dalam hal ini pemerintah sangat

³⁹ Op.cit, hlm 2

⁴⁰ Adi Widodo, dkk, *Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1 (Juli 2011), h. 28

dianjurkan untuk memperhatikan fasilitas kesehatan untuk masyarakatnya, karena masyarakat yang perekonomi di bawah garis kemiskinan mereka akan takut dengan biaya perawatan dan akses kesehatan yang mahal, sehingga mereka akan tetap dalam kondisi fisik dan jiwa yang kurang baik atau mengalami gizi buruk yang nantinya akan menyebabkan kematian meningkat. Sesuai dengan peraturan perundangan undangan tentang kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Bab 4 pasal 12 ayat 1 dimana disebutkan bahwa “pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.

2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup dijadikan suatu indikator untuk mengukur kesehatan individu di suatu daerah. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk program kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas untuk

perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).⁴¹ Jika dikaitkan dengan teori lingkaran perangkap kemiskinan oleh Nurske yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Tingkat produktivitas masyarakat yang meningkat dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan dipandang sebagai salah satu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi. Meningkatnya angka harapan hidup mencerminkan adanya peningkatan kualitas kesehatan di daerah tersebut, baik peningkatan pada sarana maupun pelayanan kesehatan.⁴²

3. Kesehatan Dalam Ekonomi Islam

Kesehatan dalam ajaran Islam selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal, baik dalam hal itu ialah baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Di bahas dalam firman Allah QS. Thaha ayat 81 sebagai berikut:

⁴¹ Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus dalam Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018

⁴² Filma Anggaedi "Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Penangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013" e-Jurnal Katlogis, Vol 3, No.7 (Juli 2011)5, h.46-47

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ

غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝ ٨١

Artinya: Makanlah diantara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku. Maka sesungguhnya binasalah ia.

Maksud dari ayat di atas ialah bahwa Islam menganggap bahwa kesehatan termasuk bagian dari nikmat Allah SWT yang paling besar. Orang yang didera oleh keluhan atau rasa sakit tentu akan merasa kurang nyaman menjalani kehidupan. Oleh karena itu manusia harus banyak bersyukur atas nikmat sehat yang disandangnya, agar pemberian Allah kepadanya semakin bertambah. Rasulullah meminta kita agar selalu berdoa agar dianugerahi dua kesehatan, yakni kesehatan agama dan kesehatan dunia.

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan tersebut dapat berupa tindakan *preventif* (pencegahan) dan *reprensif* (pengobatan).⁴³

Konsep menjaga kesehatan jasmani menurut islam adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga thoharoh atau menjaga kesucian dan kebersihan dari semua aspek mulai dari sekujur badan, makanan, pakaian, tempat tinggal maupun lingkungan.

⁴³ Suparno H, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur", Jurnal Ekonomika Bisnis, Vol, 5, No. 1 (Januari 2014), h. 22

- b. Menjaga makanan, ajaran islam selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang halal lagi baik, baik dalam dzatnya maupun baik dalam cara mendapatkannya.
- c. Olahraga, bertujuan untuk menjadikan manusia sehat dan kuat. Dalam Islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua trebaik setelah iman. Adapun menjaga kesehatan rohani dalam Islam adalah sebagai berikut:
 - a). Perbanyak ibadah artinya perbanyak melakukan perintah Allah SWT dan menjauhi segala bentuk laranganNya.
 - b). Perbanyak Zikir, artinya dianjurkan untuk selalu mengingat Allah, dalam semua kondisi baik dalam kondisi senang maupun susah.
 - c). Berkhusnudzon (berbaik sangka) artinya selalu berprasangka yang positif dengan segala sesuatu yang terjadi, dan erfikir itu semua sudah kehendak dari Allah.

4. Kesehatan Dalam Sudut Pandang Ekonomi

Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan kesehatan merupakan hak dasar (asasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan perlindungan fasilitas kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan setiapp penduduk berhak memperoleh derajat kesehatannya yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja atau pengeluaran pembangunan untuk pempaungan sumber daya manusia.

Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Lain dan Pasay yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut Purcal dan Cohen menyatakan bahwa, betapa paradigma kesehatan di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan anggota negara-negara ASEAN lainnya. Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan Vietnam sejak beberapa tahun lalu mulai melihat dan menempatkan masalah kesehatan sebagai investasi jangka panjang (long term human investment), sementara Indonesia masih saja belum beranjak dari paradigma lama, kesehatan sekedar hanya konsumsi. Konsekuensi dari paradigma usang kesehatan sebagai konsumsi itu antara lain berupa pengabaian masalah kesehatan dalam prioritas anggaran pembangunan.⁴⁴

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disuatu Negara akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan penduduknya dan berkaitan erat

⁴⁴ Meylana Astri, dkk, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia" jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1 No.1 (Maret 2013), h. 85-86

pula dengan kemampuan negara tersebut untuk mengembangkan pelayanan kesehatan maupun kegiatan-kegiatan lain disektor kesehatan. Oleh karena itu kebijaksanaan di bidang kesehatan dan pelaksanaannya jga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi secara makro. Program-program kesehatan hendaknya dipandang sebagai suatu strategi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari suatu penduduk. Strategi tersebut membutuhkan pilihan program-program yang dapat meningkatkan derajat kesehatan secara efisien. Seperti, pengembangan jaringan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur air bersih, peningkatan gizi masyarakat, imunisasi dan lain sebagainya.

Di negara miskin atau sedang berkembang untuk menentukan prioritas kajian terhadap strategi dan skala yang perlu ditetapkan sebagai kebijakan dalam beberapa bentuk pelayanan yang ada masih sulit atau tidak mudah. Oleh karena itu, segala usaha untuk memperluas pilihan dalam hal meningkatkan pelayanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan akan dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat. Hal tersebut sangat relevan bagi konteks ekonomi negara yang berpendapatan rendah. Perawatan kesehatan sangat menyerap biaya pemerintah maupun anggaran keluarga. Selain itu, banyak juga peralatan kesehatan yang harus dibeli dengan menggunakan valuta asing sehingga akan banyak menghabiskan devisa, hal tersebut merupakan keterbatasan negara miskin.⁴⁵

5. Hubungan Kesehatan Dengan Kemiskinan

⁴⁵ Lubis Ade Fatma, *Ekonomi Kesehatan* (Medan: USU Press, 2009), h. 8-9

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Kesehatan merupakan standar hidup minimum yang harus dimiliki oleh setiap individu masyarakat. Kesehatan masyarakat yang cenderung baik akan berdampak pada produktifitas dan etos kerja yang meningkat pula, alhasil pendapatan yang dihasilkan meningkat seiring dengan perbaikan kesehatan di masyarakat. Pendapatan baik secara individu maupun agregat akan bertambah. Pendapatan yang meningkat akan mengangkat derajat seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Lincoln menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan menurut Nurse dalam teori lingkaran setan kemiskinan juga mengemukakan produktivitas yang rendah sebagai faktor yang menyebabkan kemiskinan. Produktifitas yang rendah bisa diakibatkan oleh tingkat kemiskinan yang rendah. Kesehatan yang rendah akan mengakibatkan etos kerja menurun dan produktivitas seseorang menjadi rendah. Produktivitas yang rendah akan berdampak pada pendapatan yang menurun dan membawa seseorang menjadi rentan terhadap kemiskinan.

Menurut Jeffrey Sach, terdapat enam utama yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin. Pertama, modal manusia yang mencakup kesehatan, nutrisi keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi produktif dalam ekonomi. Kedua, modal usaha yang meliputi mesin, fasilitas motor elektronik yang

dipergunakan dalam bidang pertanian, industri termasuk industri jasa. Ketiga, infrastruktur seperti jalan, listrik, air, sanitasi dan sistem telekomunikasi. Keempat, modal yang berkaitan dengan alam yaitu tanah yang subur, keanekaragaman hayati, ekosistem yang berfungsi dengan baik yang dapat menyediakan pelayanan lingkungan yang dibutuhkan manusia. Kelima, modal institusi publik, seperti peraturan-peraturan perdagangan komersial, sistem huku, pelayanan dan kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tenaga kerja yang damai dan adil. Keenam, modal pengetahuan yang terdiri atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan produktifitas dalam menghasilkan produk serta meningkatkan modal fisik dan alam.⁴⁶

Menurut Strauss dan Thomas, mereka berpendapat bahwa ada keterkaitan yang kuat antara kesehatan dengan kemiskinan. Kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, semakin besar kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan. Upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan cukup penting dalam pengentasan kemiskinan, karena peningkatan kualitas kesehatan dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Jadi kesehatan penting dimiliki oleh setiap individu, karena dengan peningkatan kualitas kesehatan maka akan meningkatkan produktifitas dan meningkatkan output pendapatan masyarakat.

⁴⁶ Moh. Kurniawan Dp, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lilin)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Palembang (2017), h. 17

C. Jumlah Penduduk

1. Definisi Penduduk

Lembaga BPS dalam statistik Indonesia menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan menurut Said, yang di maksud penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu yang dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya proses kelahiran, kematian, dan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain. Sedangkan penduduk menurut Nurdiman adalah, mereka yang menetap dan berdomisili di suatu negara. Menurut Srijanti dan A. Rahman penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut. Penduduk menurut Dr Kartomo, penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga negara. Menurut P.N.H Simanjuntak, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisilidi dalam suatu wilayah negara.⁴⁷

⁴⁷ Sahrudin Didu dan Ferri Fauzi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 6, No, 1 (April 2016), h. 106

Menurut Todaro dan Smith, penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga dapat menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan dapat merangsang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti kemiskinan akan menurun.

2. Teori Kependudukan

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi.

Tidak ada suatu keragu-raguan terhadap sejarah di negara-negara yang sudah maju bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat justru menyumbang

terhadap kenaikan penghasilan riil per kapita. Ini disebabkan karena negara-negara yang sudah maju tersebut telah siap dengan tabungan yang akan melayani kebutuhan investasi. Tambahan penduduk justru akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga sebagai sumber permintaan yang baru. Keadaan ini dapat dihubungkan dengan teori dari Prof. A Hansen mengenai stagnasi sekular (*Secular Stagnation*), yang mengatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif, terutama investasi.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang yaitu bahwa perkembangan yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Kaum Klasik seperti Adam Smith, David Richardo, dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam lapangan penyediaan pekerjaan.

Teori kependudukan menurut beberapa ahli :

a. Teori Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus adalah orang yang pertama mengemukakan tentang penduduk. Dalam “*essay on population*”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tidak bisa tertahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih baik dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret

ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan bahan makanan mengikuti hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Maltus.⁴⁸

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencapai jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk seimbang dengan batas lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *proventif checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan bahwa hawa nafsu dan pantangan kawin), *positive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert

⁴⁸ Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui*, (Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2015), h. 15.

Malthus mengungkapkan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu :

- 1.) Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
- 2) Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih hemat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Teori Malthus ini mendapat berbagai kritik karena Malthus tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.) Kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makanan dapat berjalan.
- 2.) Kemajuan bidang teknologi, terutama bidang pertanian.
- 3.) Usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah.
- 4.) Fertilitas akan menurun apabila perbaiki ekonomi dan standar hidup dinaikkan.⁴⁹

b. Teori Ekonomi dan Kependudukan Aliran Klasik

Pada hakekatnya aliran klasik bukan merupakan suatu aliran pemikiran dalam pengertian biasa. Unsur pemersatu yang melekat di dalam pandangan para penulis tersebut ialah mengenai hukum yang

⁴⁹ Edmund Conway, Op Cit, h. 32.

menguasai tingkat dan arah perkembangan penduduk, distribusi upah, bunga dan laba. Setidaknya pada suatu titik tertentu di dalam bidang pertanian dapat diharapkan timbulnya *decreasing returns* yang disebabkan oleh kuantitas dan kualitas dari tanah yang terbatas, dan kesempatan untuk memperluas jangkauan pembagian kerja dan kemajuan teknologi yang terbatas. Dua prinsip yang menjadi landasan doktrin klasik (yaitu diminishing returns dan tekanan jumlah penduduk terhadap nafkah hidup) merupakan inti pandangan aliran klasik terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Meskipun hampir semua aliran ekonomi klasik maupun para penerusnya menganggap mungkin bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk akan berakhir, tetapi hanya beberapa diantaranya saja menganggap keadaan yang stasioner itu sebagai sesuatu yang akan segera terjadi. Menurut Smith, penduduk yang sedang berkembang yang disebabkan oleh semakin meluasnya sarana dan mantapnya penemuan kemampuan teknologi, akan lebih menyebabkan pembagian kerja semakin bertambah banyak. Menurut gagasan Everett, jumlah penduduk yang semakin banyak akan menyebabkan terjadinya pembagian kerja sehingga dalam penerapannya akan menyebabkan keterampilan menjadi semakin meningkat. Carry lebih menekankan kepada apa yang disebutkan sebagai kekuatan asosiasi yang senantiasa akan berkembang apabila jumlah penduduk meningkat sehingga pekerjaan akan semakin

beranekaragam dan keterampilan manusia akan semakin meningkat sehingga output perkapita akan naik.

c. Aliran Marxist (Karl Mark dan F. Angel)

Menurut teori ini populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia. Sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Dalam konteks historis materialisme yang lebih luas, Mark dan Angel memang tidak menyusun formulasi tentang teori kependudukan semata-mata, tetapi menyusun prinsip-prinsip dasar yang mereka anggap sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kependudukan serta korelasi ekonomi dan sosial. Ia menyebut juga bahwa, setiap historis model produksi yang khas didalamnya tercakup berbagai faktor sosial berbeda-beda, secara historis memang berlaku dalam batasan-batasan tertentu. Menurut pandangannya, hukum kependudukan yang abstrak atau alamiah hanya terdapat pada tanaman dan binatang saja selama manusia tidak mencampurinya.

Aliran Marxist tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk disuatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja. Marxist berpendapat

juga bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.⁵⁰

Berdasarkan dari ketiga teori di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penekanan pada jumlah ketersediaan bahan makanan pada masa mendatang, karena nafsu manusia yang tidak terbendung dan tidak pernah merasa puas akan hal yang telah ia dapat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja yang tidak diseimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan teknologi yang memadai, namun jika pertumbuhan penduduk dibarengi dengan skill penduduk yang tinggi, maka akan dapat menambah keterampilan atau bahkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk penduduk yang lain, dan penduduk yang memiliki skill yang bagus maka ia tidak akan kalah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini.

3. Faktor Demografi

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan masalah kependudukan menjadi masalah yang serius dan harus segera ditangani. Banyak faktor yang mempengaruhi masalah pertumbuhan penduduk salah satunya yaitu faktor demografi. Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk didominasi oleh determinan demografi yaitu:

⁵⁰ Achmad Faqih, *Kependudukan – Teori, Fakta Dan Masalah* (Yogyakarta: Dee Publish, 2010), h. 14-16

a) Mortalitas atau fertility (kelahiran),

Tingginya angka laju pertumbuhan yang terjadi di negara berkembang pada umumnya, seperti Indonesia adalah beban dan dapat menghambat proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan. Sebagai negara berkembang Indonesia diuntungkan dengan diketemukannya berbagai teknologi dan alat kontrasespsi oleh negara-negara barat melalui industrialisasi dan modernisasi untuk diadopsi menjadi program keluarga berencana (KB) sehingga dapat menurunkan angka kelahiran (fertilitas) relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara Eropa pada umumnya. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas dapat menggambarkan kecepatan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara. Ukuran-ukuran fertilitas yang penting untuk diuraikan, antara lain kelahiran kasar (*crude fertility rate*), angka kelahiran menurut kelompok umur (*age specific fertility rate*), dan kelahiran total (*total fertility rate*).⁵¹

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan pengukuran mortalitas karena seorang wanita hanya mati satu kali tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Di samping itu seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu tidak mempunyai resiko kematian yang kedua kali. Sebaliknya wanita yang melahirkan seorang anak tidak berarti

⁵¹ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19

resiko melahirkan dari wanita tersebut berhenti. Kompleksnya pengukuran fertilitas juga disebabkan karena keterlibatan dua orang (suami dan istri). Masalah yang lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami resiko melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat pasangan untuk berumah tangga juga pada wanita yang bercerai atau menjanda.⁵²

b) Mortality atau Mortalitas (kematian)

Yang dimaksud dengan mortalitas adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen yang terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan kata lain, mati tidak akan pernah ada kalau tidak ada kehidupan. Sedangkan hidup dimulai dengan lahir. Penerapan angka kematian bayi dipakai sebagai angka probabilitas untuk mengukur resiko kematian dari seseorang atau bayi dari saat kelahirannya sampai menjelang umur satu tahun. Apabila suatu penduduk mempunyai angka kematian bayi 200 (dua ratus) per 1.000 (seribu) kelahiran hidup ini berarti bahwa, probabilitas mati seorang bayi yang baru lahir pada penduduk tersebut sebelum mencapai umur satu tahun adalah 20%. Usia yang dicapai sebelum terjadinya kematian merupakan harapan hidup dari seorang penduduk. Harapan hidup merupakan indikator yang baik untuk menunjukan sosial ekonomi secara umum.⁵³

⁵² Nyoman Suartha, *faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan dan implementasi kebijakan penduduk di provinsi bali*” jurnal kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia, Vol. 12 No. 1 (1 Juli 2016), h. 3

⁵³ Ibid, h. 3

Ukuran mortalitas menunjukkan suatu angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana sampai yang cukup kompleks. Biasanya berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus guna mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Ukuran-ukuran kematian tersebut antara lain : angka kematian kasar (*crude death rate*), angka kematian menurut umur (*age spesific death rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*).⁵⁴

c) Migrasi (perpindahan penduduk)

Todaro menyatakan, migrasi merupakan suatu proses yang sangat selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan, dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi. Variasi tersebut tidak hanya terdapat pada proses migrasi antar wilayah pada negara yang sama, tetapi juga pada migrasi antar negara. Menurut Mantra, migrasi adalah suatu proses perpindahan penduduk antar wilayah satu ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas penduduk non permanen merupakan gerakan suatu penduduk dari suatu tempat ke tempat lain namun tidak bermaksud untuk

⁵⁴ Ibid, h. 26

menetap di daerah tujuan. Batas wilayah yang digunakan adalah batas administratif.⁵⁵

Negara sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi atau tingkat kelahiran yang meningkat secara terus menerus yang tidak diseimbangi dengan lapangan kerja yang memadai atau kualitas penduduk yang masih rendah, maka akan menjadi masalah besar dalam meningkatnya jumlah penduduk miskin, maka dari itu program keluarga berencana (KB) dari pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran.

4. Ledakan Penduduk

Ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Penurunan angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena membaiknya kondisi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak diseimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara.⁵⁶

a. Faktor-faktor penyebab ledakan penduduk

a) Tingkat kematian yang menurun

⁵⁵ Ibid, h. 3

⁵⁶ Irawan dan M. Suparamoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), h.

Ada empat faktor yang menyumbang terhadap penurunan angka kematian pada umumnya:

1. Adanya kenaikan standar hidup sebagai akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja serta tercapainya perdamaian dunia yang cukup lama.
2. Adanya perbaikan pemeliharaan kesehatan umum (kesehatan masyarakat), maupun kesehatan individu. Dalam abad ke-19 ini telah banyak usaha yang ditujukan untuk memperbaiki mutu bahan makanan dan air minum serta adanya peningkatan dalam kebersihan individu yang semua ini mendorong terhindarnya hampir segala macam penyakit.
3. Adanya kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran serta diperkenalkannya lembaga-lembaga kesehatan umum yang modern, World Health Organization (WHO) sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang terserang penyakit.
4. Meningkatnya penghasilan rill perkapita, sehingga orang mampu membiayai hidupnya dan bebas dari kelaparan dan penyakit, dan selanjutnya dapat hidup dengan sehat.

b) Tingkat kelahiran yang tinggi

Dinegara-negara industri pertumbuhan penduduk berlangsung terus disamping adanya penurunan tingkat kelahiran, misalnya di Perancis, AS, dan Inggris, tingkat kelahiran terus menurun sejak abad ke-19 sampai awal abad ini. Di negara-negara

yang sudah maju terutama negara Barat, penurunan tingkat kematian sungguh-sungguh telah diikuti oleh suatu penurunan tingkat kelahiran pula. Menurut Prof. E.E Hagen, ia menganggap bahwa angka kelahiran itu ditentukan oleh tingginya tingkat kematian. Tingkat kelahiran disesuaikan dengan tingginya tingkat kematian dengan maksud agar suatu keluarga memiliki jumlah anak yang sedikit dan dapat hidup sampai hari tua. Di sebagian besar negara Eropa, telah terjadi pula suatu penurunan kematian yang lambat, kemudian tingkat kelahiran mulai mengikutnya dalam seperempat abad yang terakhir dari abad 19. Jadi pada mulanya, tingkat kematian menurun, sedangkan tingkat kelahiran tetap, yang ini membuahkan pembangunan ekonomi.

Namun keadaan tersebut berbeda dengan keadaan di negara sedang berkembang, dimana turunnya tingkat kelahiran belum tampak bahkan di beberapa negara tingkat kelahiran masih menunjukkan gejala-gejala yang meningkat sampai awal 1970-an. tahun 190-an, negara-negara yang sedang berkembang memiliki tingkat kelahiran diantara 40 dan 50 per 1.000 orang pertahun, sedangkan di negara-negara maju angka itu berkisar anatar 20 per 1.000 orang pertahun.

c) Migrasi (perpindahan penduduk)

Bagi negara sedang berkembang migrasi tidaklah berarti dalam peningkatan jumlah penduduk maupun pengurangan jumlah

penduduk. Perpindahan penduduk ke luar negeri yang berasal dari negara-negara sedang berkembang sudah tidak efektif guna mengurangi kepadatan penduduk, di karenakan banyak negara seperti Australia, Rhodesia dan Suriname tidak bersedia menerima perpindahan penduduk dari negara sedang berkembang yang padat penduduknya, dengan alasan kesulitan-kesulitan integrasi sosial dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dari negara yang mengalami tekanan tingkat penduduk.

Akibatnya dengan penurunan tingkat kematian yang cepat dan tingginya tingkat kelahiran dan kurang efektifnya migrasi, maka pertumbuhan penduduk akan tampak sangat cepat dan mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk di negara sedang berkembang.⁵⁷

b. Dampak Negatif Ledakan Penduduk

- a. Tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi.
- b. Kekurangan pangan, sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan.
- c. Timbulnya permukiman atau daerah kumuh diperkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah.

⁵⁷ Irawan dan M. Suparamoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), h.103-110

- d. Pemerintahan mengalami kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan perumahan karena lokasi yang sudah padat oleh pemukiman penduduk dan jumlah dana yang besar.
- e. Meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup.
- f. Tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan dan konflik antar penduduk.⁵⁸

5. Penduduk Menurut Perspektif Islam

Dalam Islam sendiri sesungguhnya mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas, manusia yang jumlahnya banyak namun tingkat kualitasnya rendah alih-alih memberi rasa bangga namun sebaliknya, merendahkan dan melemahkan. Jumlah yang banyak tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

⁵⁸ Embun Bening Diniari, “*Mengenal Dampak Ledakan Penduduk*” (on-line) Tersedia di: <http://blog.ruangguru.com/mengenal-dampak-ledakan-penduduk> (diakses pada tanggal 29 agustus 2019, pukul 20:42)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Qs.An-Nisa:9)*

Maksud ayat di atas ialah, bahwa kesejahteraan merupakan impian dan harapan manusia yang hidup di muka bumi ini. Maka dari itu, setiap orang tua pasti mengarpakan kesejahteraan bagi anak-anaknya dan keluarganya, baik itu kesejahteraan berupa materi maupun spiritual, orang tua berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Islam melarang umatnya meninggalkan anak-anak yang lemah dengan keadaan yang miskin, dengan demikian orang tua harus mempersiapkan anak keturunannya dengan baik dan bertaqwa kepada Allah.

Menurut Ibn Khaldun, ia mengaitkan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, menurutnya bahwa setiap kali jumlah penduduk meningkat maka berdampak pula pada meningkatnya jumlah produksi dan apabila masyarakat tidak mampu memenuhinya maka akan berdampak pada kemiskinan. Sebaliknya apabila jumlah penduduk menurun, maka akan menurun pula kuantitas produksi. Menurut Ibn Khaldun ditempat-tempat yang kurang penduduknya kemiskinan adalah kecil dan pengasilan tinggi sebab sedikitnya persaingan mencari kerja antar manusia.

Dengan demikian Ibn Khladun menghargai kerja dan dampak ekonomisnya. Selain itu juga menekankan fungsi sosial dan moral kerja. Sebab masyarakat desa, yang banyak bekerja memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebab dari itu mereka mempunyai keistimewaan, yaitu moral mereka yang kuat. Sementara masyarakat kota yang hidup dalam kemewahan akan menimbulkan rasa kemalasan, selalu bersantai, dan ketenggalaman dalam berbagai kenikmatan hidup yang nantinya akan menyebabkan moral mereka rusak. Dengan demikian kerja menurut Ibn Khladun merupakan katub pengaman moral, sebab ketenggelaman dalam kemewahan tanpa kerja akan mengantarkan pada penyelewengan.

6. Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Kemiskinan

Menurut kaum klasik, pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan apalagi dalam jumlah yang besar yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian, penduduk dianggap sebagai beban pembangunan.

Menurut Nelson dan Leibstein, terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Menurut Maier, dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pembangunan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menghambat pembangunan, yaitu:

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi di masa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi sumber daya manusia semakin sulit.
- b) Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk, memperlambat pertumbuhan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.
- c) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di

negara sedang berkembang membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.⁵⁹

Jadi pertumbuhan atau laju penduduk yang tinggi akan menghambat pembangunan ekonomi bila tidak diseimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan diimbangi dengan teknologi yang memadai.

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mempengaruhi banyak hal seperti meningkatnya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi juga mempengaruhi kas pemerintah guna untuk menyediakan pelayanan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan di generasi selanjutnya.

D. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah

⁵⁹ Ibid, h. 106-107

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶⁰

Menurut Arfida BR, pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang.⁶¹

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat akan mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dilihat dari fungsi pendidikan itu sendiri ialah pendidikan sebagai penegak nilai, sarana pengembang, masyarakat, dan upaya pengembangan potensi manusia.⁶²

⁶⁰ Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁶¹ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),h.77

⁶²Yacob, Yarlina,"*pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota kalimantan*"Vol 8,No 3, (Oktober 2012)

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan serta menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat. Pada dasarnya jenis dan tingkat pendidikan di anggap dapat mewakili kualitas sumber daya manusia.

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut, serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam proses pendidikan. Karena itu, bagaimanapun peradaban suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.⁶³

Dalam perspektif ekonomi pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan di masa mendatang, baik kepada masyarakat atau negara, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri.⁶⁴ Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan

⁶³ Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 9.

⁶⁴ Astri Winarti, "Analisis Pengaruh Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan Dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia periode 1992-2012". (Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), h. 18

merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.⁶⁵

Di Indonesia pendidikan di naungi oleh dua Kementrian, yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementrian Agama. Dimana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan negara.⁶⁶ Berbeda halnya dengan Kementrian Agama yang menaungi pendidikan berbasis keagamaan baik pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia pendidikan tinggi non agama di naungi oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang hanya memiliki kewenangan terkait Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan tinggi Swasta.⁶⁷

Objek pendidikan ada dua yaitu, objek materi dan objek formal. Objek materi adalah materinya atau bendanya yang dikenai pendidikan, yaitu peserta didik dan warga belajar. Objek formal adalah apa yang dibentuk

⁶⁵ I Ketut Sudarsana, "Peningkatan Mutu Pendidikan Lur Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia", Jurnal Penjamin Mutu (Denpasar 2016), h.1

⁶⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2015, Tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 2.

⁶⁷ Kementrian Ristekdikti RI, Puspa Warna Pendidikan Tinggi Indonesia (Jakarta: Kementrian Ristekdikti RI, 2016), H.36

oleh pendidikan, yaitu gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan di ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah wawasan.⁶⁸

2. Rata-rata Lama Sekolah

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan salah satunya ialah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah digunakan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan :

RLS= Rata-rata Lama Sekolah

X_i = lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun ke atas

N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan tamat sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.⁶⁹ Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 sebesar 6,96 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Tanggamus yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,96 tahun.

⁶⁸ Amos Neolaka, Grace Amialia, *Landasan Pendidikan Dasar pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 13

⁶⁹ Badan Pusat Statistik, “rata-rata lama sekolah” (*on-line*) Tersedia di : <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/572> (25-desember 2019, pkl 23:54)

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Menurut Tobing, ia mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah maka ia akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Sedangkan menurut Licolin, pendidikan (*formal dan non formal*) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktifitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitasnya dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.⁷⁰

3. Indikator Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang erat dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh manajer-manajer sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlibat prestasinya pada seleksi tentang bidang yang dikuasainya, dengan kata lain hasil seleksi memperkuat dan meyakinkan manajer sumber daya manusia untuk menetapkan orang yang bersangkutan pada tempat yang

⁷⁰ Merna Kumalasari. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah” (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2011) h.36

tepat. Pendidikan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan.⁷¹

Menurut UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, indikator pendidikan terdiri dari tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan :

1. Tingkat Pendidikan

Menurut Andrew E. Siskula tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur dan sistematis dan teroganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Demikian Hariandja menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan.

2. Kesesuaian Jurusan

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan karyawan tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualitas pendidikannya. Dengan demikian karyawan dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan

⁷¹ Ayuk Wahdanfiari Adibah, *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Bank Bri Syariah Kantor Cabang Kediri*, (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014), h.32-33.

⁷² Rio Tanjung, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Ada PT Garuda Plaza Hotel Medan*, (Universitas Sumatera Utara, Medan 2011), h.8-9

dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia, dimana kualitas sumber daya manusia yang memadai akan dapat membuat seseorang itu memiliki sifat dan sikap yang kreatif, inovatif dan produktif, sehingga ia akan mampu bersaing dengan individu lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena saat ini banyak sekali fenomena pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil, maka dari itu perusahaan perlu memperhatikan jurusan yang sesuai dengan bidang yang akan ditempati oleh karyawannya sehingga nantinya tidak akan timpang.

4. Jenis-jenis Pendidikan

Ada tiga jenis-jenis pendidikan, yaitu:

d. Pendidikan In-formal (keluarga)

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antara sekelompok orang yang mempunyai pola kepentingan masing-masing dalam menididik anak yang belum ada lingkungannya. Kegiatan pendidikan dalam lembaga ini tanpa ada suatu organisasi yang ketat. Tanpa ada program waktu dan evaluasi.⁷³ Menurut Hasbullah pendidikan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena

⁷³ Ibid, h. 318

sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidik yang paling banyak diterima oleh anak adalah keluarga.⁷⁴

e. Pendidikan Formal (Sekolah/Madrasah)

Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati berpendapat tentang lembaga sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.⁷⁵ Menurut Hasbullah pendidikan dasar adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.⁷⁶

f. Pendidikan Non-Formal (masyarakat)

Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.⁷⁷ Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya.⁷⁸ Menurut Hasbullah pendidikan masyarakat adalah

⁷⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 39

⁷⁵ Ramyulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mutia, 2002), h.320

⁷⁶ Hasbullah Op.Cit h, 46

⁷⁷ Ibid, h. 325

⁷⁸ Umar Tirtarahardja, S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Cet-2, 2010), h. 179

sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupan.

5. Tujuan Pendidikan

Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai tujuan pendidikan tersendiri yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional menurut UUD 1945, yang diatur dalam pasal 31 ayat 3 dan pasal 31 ayat 5, UUD 1945 pasal 31 ayat 3 menyebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 menyebutkan, “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Ditegaskan dalam UU No.20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab.

Menurut M.J Langeved, tujuan pendidikan adalah merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa mengarah kearah kedewasaan. Secara khusus M.J Langeved mengategorikan tujuan pendidikan itu menjadi enam yaitu sebagai berikut:

- 1.) Tujuan pendidikan umum. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuki mencapai kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. Pertumbuhan jasamni yang dimaksud dalam tujuan pendidikan adalah apabila pertumbuhan batas fisik maksimal yang bisa dicapai oleh seorang anak. Sementara kedewasaan rohani yang dimaksud dalam tujuan pendidikan adalah berarti mempunyai seorang naak untk menolong dirinya sendiri ketika mengalami permasalahan dan mampu bertanggung jawab atas semua perbatannya.
- 2.) Tujuan pendidikan khusus yaitu tujuan pendidikan yang hendak dicapai secara khusus berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, intelegensi, lingkungan sosial budaya, dan lain sebagainya.
- 3.) Tujuan pendidikan tidak lengkap yaitu, tujuan pendidikan yang menyangkut hanya sebagian aspek pada hidup manusia.
- 4.) Tujuan pendidikan sementara, yaitu tujuan pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui satu langkah. tujuan pendidikan sementara dapat dipahami sebagai proses yang ditempuh untuk mencapai

tujuan pendidikan utaaam setingkat demi setingkat. Tujuan pendidikan pada tiap tingkatan inilah yang dipahami sebagai tujuan pendidikan sementara.

- 5.) Tujuan pendidikan intermedit yaitu, merupakan tujuan pendidikan sampingan yang berfungsi sebagai perantara tujuan pendidikan pokok.
- 6.) Tujuan pendidikan inisidental yaitu, merupakan tujuan pendidikan yang dicapai pada saat-saat tertentu dengan sifat seketika dan spontan.⁷⁹

6. Pendidikan Menurut Islam

Dalam konteks Islam, Pendidikan secara bahasa (lughatan) ada tiga kata yang digunakan. Ketiga kata tersebut, yaitu (1) “at-tarbiyah, (2) al-ta”lim, dan (3) at-ta”bid. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling mencocok untuk pemaknaan pendidikan dalam slam. Ketiga kata itu mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain.⁸⁰

Menurut istilah pendidikan banyak dirumuskan oleh pakar pendidikan islam, sesuai dengan perspektif masing-masing. Diantaranya adalah sebagai berikut :

⁷⁹ Hamid Darmadi, “*Pengantar Pendidikan Era Globalisasi*”, (Jakarta: AN1MAGE, 2019), H. 16-17

⁸⁰ Ibid, h. 33.

- a. Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmani, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya dan perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun tulisan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

Artinya : *“Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu Yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhan mu lah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”*

Surat al-alaq ialah surat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhhamd SAW, yang diawali dengan lafadz bismillah yang berarti segala sesuatu itu harus di awali dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, ayat pertama jelas berbunyi iqra yang artinya bacalah yang berarti perintah Allah kepada hambaNya untuk senantiasa mencari ilmu baik itu ilmu qauliyah (ayat al-quran) yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firmanNya, maupun ilmu qauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa keadaan alam semesta. Ayat kedua menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan manusia adalah ciptaan Allah yang paling

sempurna tidak ada makhluk Allah selain manusia yang diciptakan sesempurna manusia karna Allah menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan dan petunjuk agama. Semua itu Allah berikan kepada manusia agar manusia berfikir dan menaati segala perintahNya dan menjauhi laranganNya. Ayat ketiga dan keempat Allah mengajar manusia dengan pena dan Allah yang mengajarkan manusia mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, karena pada hakekatnya manusia di lahirkan ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepada manusia berupa mata dan telinga maka manusia dapat melihat dan mendengar, sehingga manusia dapat mencari tahu ilmu pengetahuan baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya yang bersifat positif untuk dirinya sendiri, dan manusia haruslah selalu bersyukur dengan sang penciptanya.

- b. Hasan Langgulung mengatakan, pendidikan adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal didunia dan memetik hasilnya di akhirat.⁸¹

Tema pendidikan yang dikontekskan dengan kata islam bukan sekedar transmisi ilmu, pengetahuan, dan teknologi tetapi sekaligus sebagai proses penanaman nilai karena hakikat pendidikan dalam Al-Quran adalah menjadikan manusia bertakwa untuk mencapai

⁸¹ Ibid, h. 38

kesuksesan (al-falah), baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Langgulang, manusia macam mana atau bagaimana yang ingin diciptakan melalui pendidikan.

Berbagai pendapat tentang tujuan pendidikan dan argumentasinya masing-masing dapat dikemukakan para pakar pendidikan Islam. Pendapat tersebut berkisar pada kenyataan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah menjadikan manusia yang menyembah atau beribadah dan berserah diri kepada Allah, mengembangkan potensi, dan menanamkan akhlak mulia. Jalal menyatakan bahwa secara umum, pendidikan Islam bertujuan pada usaha mempersiapkan sosok penyembah Allah atau 'abid, yaitu manusia yang memiliki sifat-sifat yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan gelar 'ibad al-rahman. Begitu juga Mursi, ia berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah peningkatan manusia yang menyembah dan mengabdikan kepada Allah dan takut kepada-Nya dalam firman Allah dalam surat Adh-dhariyat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

Dari penjelasan ayat di atas, kita dapat memahami bahwa selain untuk menjadikan hamba Allah yang mengabdikan kepada-Nya dan lebih mengenal Allah, tujuan pendidikan juga untuk

menciptkan hamba Allah yang memiliki karakter saleh secara sosial.

Secara garis besar, tujuan pendidikan dalam islam dapat dilihat dari tujuh dimensi utama, yaitu dimensi hakikat menciptakan manusia, dimensi tauhid, dimensi moral, dimensi perbedaan individu, dimensi sosial, dimensi profesional, dimensi ruang dan waktu. Dimesi-dimensi tersebut sejalan dengan tataran pendidikan dalam al-quran yang prosesnya terentang dalam lintasan ruang dan waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, orientasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan dalam islam harus merangkum semua tujuan yang terkait dalam rentang ruang dan waktu tersebut.⁸²

7. Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan

Pendidikan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibanding faktor-faktor produksi yang lain., karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat pengetahuan tenaga kerja akan menjadi penghalang bagi pembangunan ekonomi di suatu negara.⁸³

Menurut Marliantoro dalam penelitiannya memahami kemiskinan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan telah

⁸² As'aril Muhajir, *Tujuan Pendidikan dalam Perspektif A-Quran*, (Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Tulungagung, :Vol. 11, No. 2 November 2011), h. 248-252.

⁸³ Ibid, h. 101-102

menangani kemiskinan, mau tak mau, tidak dapat lepas dari kualitas sumber daya manusia (dalam konteks ini tingkat pendidikan). Berbagai kajian dan penelitian , telah membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Ia menjadi sarana ampuh bagi peningkatan sumber daya manusia. Dengan kata lain dalam perspektif ekonomi, tingkat adalah modal dasar (asset) bagi produksi, dan bukan beban proses produksi (*liabilities*). Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap satu tahun tamabahan pendidikan berarti peningkatan kemampuan kerja dan tingkat pendidikan, meskipun juga berarti penundaan penerimaan penghasilan selama satu tahun sekolah tersebut (simanjuntak). Dengan demikian pendidikan dipandang merupakan investasi yang dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produktifitas, baik pribadi maupun komunitas atau sektoral.⁸⁴

Jika dikaitkan dengan teori lingkarn setan kemiskinan Nurkse menggambarkan bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan merupakan suatu hal yang harus diputus mata rantainya una mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Keterbelakangan dan ketertinggalan dapat diatasi dengan adanya pendidikan yang diselenggrakan oleh negar auntuk warga negaranya guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang

⁸⁴ Ibid, h. 165

dapat mengurangi tingkat keterbelakangan dan ketertinggalan suatu daerah. Pendidikan juga merupakan Human Capital, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka akan meningkatkan produktivitas ini akan meningkatkan pendapatan baik pendapatan individu tersebut, maupun pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi mereka, sehingga dapat meningkatkan kehidupan mereka dari kemiskinan.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu investasi sumber daya manusia yang sangat penting, karena pendidikan merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dengan pendidikan kita mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang tinggi dibanding dengan tenaga kerja yang hanya memiliki profil pendidikan yang rendah yang tidak diimbangi dengan skill yang memadai. Dengan pendidikan kita mampu atau dapat memperluas pemahaman tentang perekonomian dan memperluas produktifitas, dan dapat memberi pilihan kepada kita apakah berperan sebagai konsumen atau pencipta lapangan kerja.

E. Tinjauan Pustaka

⁸⁵ Dicky wahyudi, Tri Wahyu Rejekingsih, "Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah", Diponegoro Journal Of Economic2, Vol.2, No.1, Tahun 2013, h. 2

a. Menurut Fitri Amalia dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Inflasi terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010”, metodologi dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berbentuk data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.048 karena probabilitasnya lebih kecil dari tingkat kesalahan besar 5% atau 0,05 maka hasilnya signifikan yang berarti pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,035 karena probabilitasnya lebih besar dari tingkat kesalahan besar yaitu 5% maka hasilnya signifikan, jika dilihat dari nilai koefisien yang ada maka inflasi mempengaruhi kemiskinan secara negatif. Pengangguran memiliki nilai probabilitas 0.168, karena probabilitasnya lebih besar dari tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05 maka hasilnya tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.⁸⁶

b. Menurut Khuri Niswati dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2003-2011” teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan data panel dan analisis dalam mencari pembuktian hipotesis menggunakan regresi

⁸⁶ Fitri Amalia, “*pengaruh pendidikan, pengangguran, inflasi terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) periode 2001-2010*” Jurnal Ekonomi Sains, Vol. X, No. (Agustus 2012)

linier berganda, hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di lima kabupaten /kota Provinsi DIY. Kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di lima kabupaten/kota Provinsi DIY, dikarenakan produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di lima kabupaten/kota Provinsi DIY. Inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di lima kabupaten/kota Provinsi DIY. UMK berpengaruh positif terhadap kemiskinan di lima kabupaten/kota Provinsi DIY.⁸⁷

- c. Menurut Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekiingsih dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah” penelitian ini menggunakan analisis data panel, sebagai alat pengolahan data menggunakan software eviews 6. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap peningkatan pada variabel pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran pemerintah menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Sedangkan untuk variabel pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya jumlah pengangguran meningkat kemiskinan juga meningkat. Namun variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan.⁸⁸

⁸⁷ Khuril Niswati, “faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di DIY tahun 2003-2011”, Jurnal Ekonomi Regional, Vol.9, No.2, (September 2012)

⁸⁸ Ibid, h.2

d. Menurut Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (studi kasus pada 33 provinsi)” penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan. Diantara ketiga variabel tersebut hanya variabel IPM yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang ada kurang berkualitas sehingga tidak mempengaruhi kemiskinan. Begitu juga dengan pengangguran bahwa tingkat TPT juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menandakan bahwa mereka yang menganggur belum tentu memiliki pendapatan yang rendah.⁸⁹

F. Kerangka Pemikiran

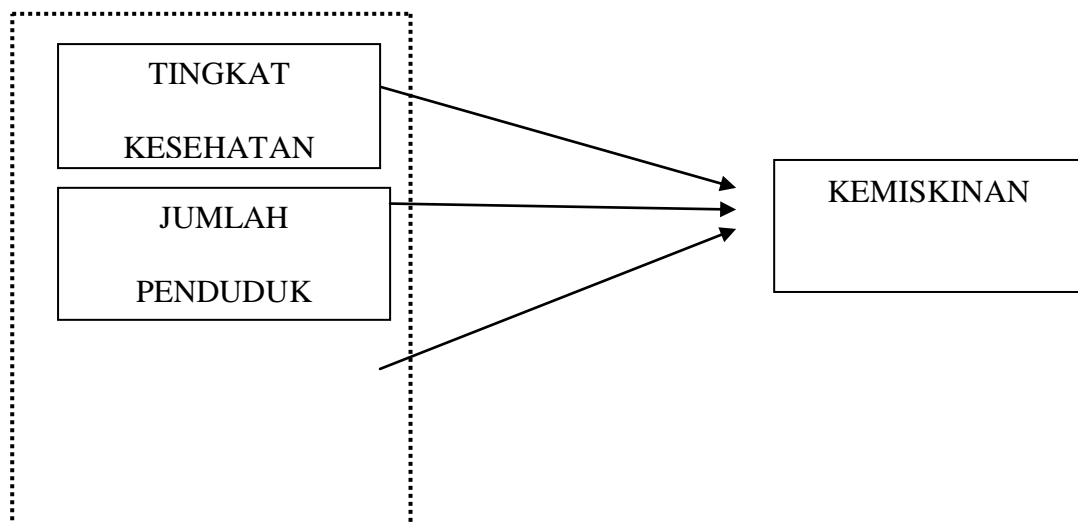
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu kesehatan, jumlah penduduk dan pendidikan yang mempengaruhi satu variabel terikat yaitu kemiskinan. Kesehatan, jumlah penduduk, dan pendidikan pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab kemiskinan.

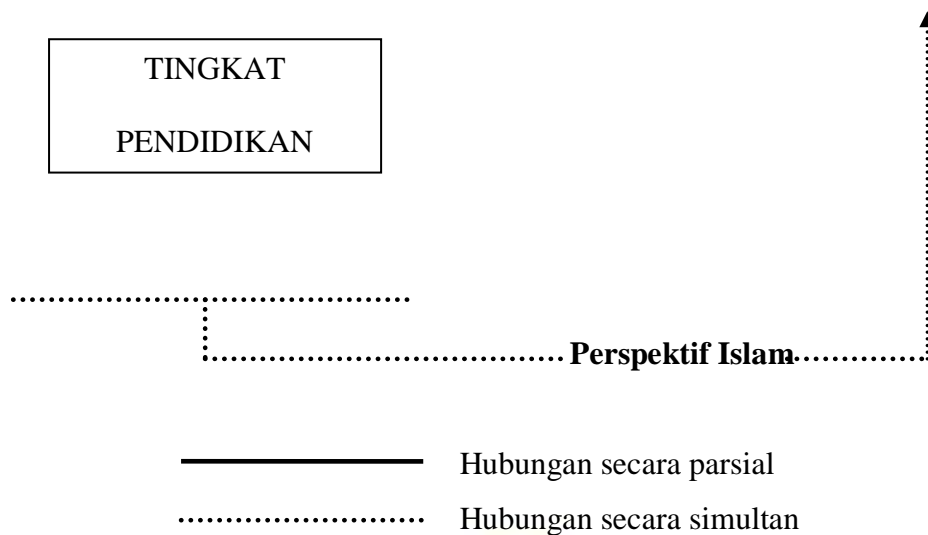
Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks

⁸⁹ Ibid,h,27-31

dan bersifat multidimensional, oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan diantaranya yaitu faktor kesehatan, jumlah penduduk dan pendidikan.

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran kerangka teori dalam pemikiran ini yang akan dikaji dalam perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:





G. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang harus di uji kebenarannya mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang di hubungkan dua variabel atau lebih.

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan untuk dasar penelitian lebih. Anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis juga merupakan data, akan tetapi kemungkinan bisa salah, maka apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji terlebih dahulu menggunakan data hasil observasi.⁹⁰

Berdasarkan hasil teoritik dan kerangka pemikiran yang telah di paparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹⁰ Sugiyono I, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 93

a. Pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan

Berdasarkan dari penelitian Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenik Woyantidalam jurnal yang berjudul “pengaruh PDRB, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran terhadap ingkat kemiskinan di Jawa Tengah”, dari hasil pembahasannya diketahui bahwa kesehatan yang dipresentasikan oleh angka harapan hidup saat lahir memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan hasil regresi, nilai koefisiennya sebesar -2,742. Artinya, setiap kenaikan angka harapan hidup saat lahir sebesar 1 (satu) tahun akan memberikan dampak penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,742%. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Bahtiar dan Meisami yang mengemukakan bahwa adanya peningkatan di bidang kesehatan akan berpyensi menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan di atas maka, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : kesehatan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018

H1 : kesehatan berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018.

b. Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh David Kristianto dan Bonivasius Prasetya yang berjudul “pengaruh jumlah penduduk, IPM, dan TPT terhadap kemiskinan (pendekatan moneter dan multidimensi) di Indonesia” berdasarkan hasil pembahasannya jumlah penduduk secara signifikan berpengaruh secara positif terhadap jumlah penduduk miskin moneter, jika jumlah penduduk meningkat 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan meningkat 0,24 persen, hal ini didukung oleh penelitian Mustika yang mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan, ia mengatakan bahwa jika jumlah penduduk meningkat maka menyebabkan jumlah tenaga semakin banyak tetapi tidak semua tenaga kerja terserap di tiap sektor produksi, sehingga membuat mereka tidak memiliki tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan menambah angka kemiskinan.

Berdasarkan dari penjelasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018

H1 : jumlah penduduk berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018

c. Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan

Berdasarkan dari penelitian Fitri Amalia dalam jurnalnya yang berjudul “pengaruh pendidikan, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur”, dari hasil pembahasannya pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.048, karena probabilitasnya lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05 maka hasilnya signifikan. Jadi, pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur, pendidikan di anggap penting karena merupakan investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat produktifitas.⁹¹ Penelitian ini sejalan dengan teori Simanjuntak yang mengatakan bahwa, dalam perspektif ekonomi tingkat pendidikan adalah asset bagi proses produksi, dan bukan beban proses produksi. Dengan kata lain, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan.

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ho : Tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018
- H1 : Tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanggamus tahun 2009-2018

⁹¹ Ibid, h. 167

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 2000)
- Ahmad Ihfan Sholihin, *Buku Pintar Bank Syariah*(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 2010)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017
- Boediono, Pengantar Ekonomi(Jakarta Erlangga,2002)
- Dapertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*,(Bekasi, 2015)
- Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Alqur-An Dan Tafsirnya Jilid II*,
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pusat,2011
- Fahmi Medias, "*Ekonomi Mikro Islam*", (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers : indonesia,2012
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori Dan Prakteknyadalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta : Ciputat Press, 2009)
- Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana,2015)
- Karl E. Case.Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*,Edisi Kedelapan,(Jakarta: Erlangga, 2007)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mundur Maju, 2012)
- Lakip Dinas Perikanan Pesisir Barat 2017
- Lexy Jmoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karay, 2011)
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012)
- M. Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Era Intermedia, 2011)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hari, 2003)
- Mokhammad Wahyu Budiono, Eko Sri Wilyono Dan Agnes Puspita Sudarmo, *Persepsi Nelayan Terhadap Program Bantuan Alat Penangkapan Ikan* . Tahun 2017
- Mukhtar, *Klasifikasi jenis Nelayan*, (On-line) (10 agustus 2019).
- Muh. In'Amuzzahidin, Konsep Kebebasan Dalam Islam, *Jurnal Al-Taqaddum*, Volume 7, Nomer 2, November 2015,
- Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)

- Munawir,S,*Analisis Laporan Keuangan*,(Yogyakarta:liberty,2002)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:kencana Penada Media Group,2007)
- Nafarin, *Pengangguran Perekonomian Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
- Nurulhuda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Edisi IV, Penerbit Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers : indonesia,2012
- Rahardja,Pratama, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 2010)
- Rony Kountur, *Metode penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara 2005)
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*,(Jakarta: Bina Grafika,2004)
- Rury lisiana,*analisis pendapatan masyarakat nelayan desa grajagan kecamatan purwoharjo kabupaten banguwangi*. Tahun 2015
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta,2012)
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*(Bandung:Alfabeta,2016)
- Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari, Maryani,"Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat", *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor2, Oktober 2012*
- Sukarni Wibowo dan Dedi Supriyadi, *Ekonomi Makro Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013)
- Ulta Abriasih, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas (BRT) Terhadap Perusahaan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi : UIN Lampung, 2017)

Jurnal

- Adeng Muchtar Ghazi, *Teologi Kerukunan Agama Dalam Islam*, *Jurnal Analisis*, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013
- Grelin Riedel Dady,Josep B. Kalangi Dank Rest D. Tolosang, *Analisis Tinkat Pendapatan Nelayan Pancing Dasar Di Kecamatan Minahasa Utara*, vol.16,no.01 Tahun 2016
- Muhammad Karim, *Analisis dampak bantuan langsung PUMP perikanan tangkap di kabapaten sukabumi jawa barat 2011*. Vol.3,no.3. tahun 2016

Mujiono, Manusia Berkualitas Menurut Alquran, *Jurnal Hermeunetik*, Vol.7, Nomer 2, Desember 2013,

Mursal Dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi, *Jurnal Penelitian*, Volume 9, Nomer 1, Februari 2015

Supriyanto “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Dan Jumlah Modal Terhadap Pendapatan Home Industri Daur Ulang DiDesa Seketi”, *Jurnal Trisula LP2M Undar*, edisi 2 Vol. 1 (VII-2015)

Vanesa Maengkong Dan kawan-kawan, *Evaluasi Pengembangan Ekonomi Nelayan Penerimaan Program Bantuan Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLM-PUMP) Dikelurahan Tidore*. Vol 11 nomor 2A, Tahun 2015.

<http://Lampungprov.go.id/>diakses tanggal 6 maret 2019 Pukul 15:50

<http://Pesisirbaratkab.gov.com/>diakses Tanggal 6 maret 2019 Pukul 16:25

